



Terbit online pada laman web jurnal : <http://ojs.unitas-pdg.ac.id/>

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan

JMK

| ISSN (Print) 2086-5031 |ISSN (Online) 2615-3300 |

Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017

Haris Mahfud Safii¹⁾, Nur Anita Chandra Putry²⁾, Suyanto³⁾

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: Agustus 2019

Revisi Akhir: September 2019

Diterbitkan Online: Desember 2019

KATA KUNCI

Political Connection, Audit Committee, Tax avoidance

KORESPONDENSI

Telepon: +62 856 4304 5700

E-mail: chandra.putry@ustjogja.ac.id

ABSTRACT

This research aims to empirically examines the influences of political connection and audit committee, on tax avoidance. The research's population is manufactur company and main sector that listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) during 2013-2017. This research samples were 50 companies with purposive sampling methods. The data were analyzed used multiple linear analysis. The results of the research showed the political connection and audit committee has affected toward tax avoidance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pajak yang digunakan di Indonesia. Wajib pajak diberi kekuasaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. *Self Assessment System* diatur dalam pasal 12 undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. [1] menyatakan bahwa penerapan undang-undang perpajakan tersebut seolah-olah memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus

dibayar dengan cara menekan biaya

perusahaan termasuk beban pajaknya. Hal ini sejalan dengan [2] yang menyebutkan bahwa praktik *tax avoidane* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan [3].

Tabel 1. Realisasi penerimaan Pajak tahun 2013-2017

Tahun penerimaan	Target	Realisasi
2013	1.148.000,00	1.077306,70
2014	1.247.949,73	1.146.865,80
2015	1.521.986,33	1.240.418,86
2016	1.540.731,53	1.284.970,10
2017	1.647.326,51	1.472.709,90

Sumber:www.bps.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1. menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa ketercapaian target penerimaan pajak salah satunya tergantung pada kesadaran wajib pajakkhususnya bagi perusahaan. Perusahaan berkontribusi cukup besar dalam sektor pajak. Namun, masih banyak perusahaan yang merasa membayar pajak adalah beban yang mana dapat mengurangi laba perusahaan. Seperti halnya kasus Direktur di hukum 7 bulan penjara dan denda 11,74 miliar setelah merugikan negara sebesar 5,8 miliar dengan melakukan kecurangan membuat faktor pajak tidak sesuai dengan transaksi ekonomi yang sebenarnya [4].

Praktik pelaksanaan penerimaan pajak, perusahaan dan pemerintah mempunyai tujuan yang bertentangan terkait dengan pembayaran pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang tinggi artinya tidak menginginkan adanya *tax avoidance* sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang rendah dengan melakukan *tax avoidance* [5][6][7].[8] menyatakan bahwa perbedaan tujuan antara pemerintah dengan perusahaan ini yang menyebabkan perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan dan legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan perencanaan pajak, (*tax planning*) yang jenis festival dan *event international*, yang menjadi daya tarik datangnya wisatawan ke Provinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan industri pariwisata tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada wisatawan saat berwisata. Wisata halal menjadi daya tarik tersendiri, terutama wisatawan lokal di Sumatera barat yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) [9]. [10] mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan yang bertujuan meminimalkan kewajiban pajak secara hati-hati dengan mengambil celah-celah dalam ketentuan pajak. Dalam praktiknya wajib pajak orang pribadi atau badan tidak secara langsung melakukan pelanggaran undang-undang namun menafsirkan undang-undang dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai [11]. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain koneksi politik dan komite audit.

[12][13][14] menyebutkan bahwa koneksi politik diharapkan mampu memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak, bagi perusahaan memperoleh berbagai keuntungan yaitu pinjaman dapat diperoleh dengan mudah, pemeriksaan pajak rendah, adanya hak-hak istimewa salah satunya mendapatkan bantuan dana saat terjadi krisisserta pembayaran pajak relatif lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh [15] [16][17][14] menunjukkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Komite audit merupakan salah satu komponen dalam *Corporate Governance* yang memiliki peran penting dalam kebijakan internal perusahaan. Tanggung jawab komite audit dalam *Corporate Governance* (CG) adalah untuk membantu dewan komisaris dengan tanggung jawab memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan tidak ada kecurangan yang dilakukan karyawan terhadap kepentingan perusahaan, serta mengawasi etika perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya [18].Kewenangan yang dimilikinya komite audit

diharapkan praktik *tax avoidance* dapat dicegah [13]. [19] menyatakan bahwa jika dalam satu perusahaan jumlah anggota komite kurang dari 3 atau tidak sesuai dengan peraturan BEI, maka tindakan manajemen dalam meminimalkan laba untuk kepentingan pajak akan meningkat [18][20][21] menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan [13][22] dan menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan bahwa perusahaan merupakan bentuk kontrak antara pemilik (principal) perusahaan dengan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut [23]. Dalam mewujudkan kontrak yang dimaksud, pemilik perusahaan menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Manajer sebagai pemimpin operasional perusahaan mempunyai tanggung jawab mengelola perusahaan sesuai kontrak yang diamanahkan oleh pemilik. Pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada manajer berupa gaji, bonus dan kompensasi lainnya atas apa yang telah dilakukan manajer terhadap perusahaan [24].

Menurut [25] menyebutkan tiga bentuk keagenan yaitu, antara pemilik dengan manajemen, kreditor dengan manajemen, dan pemerintah dengan manajemen. Oleh karena itu pemilik (principal) bukan hanya pemilik perusahaan tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah [14]. Teori

agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang muncul antara pemilik utama perusahaan yaitu pemerintah yang merangkap sebagai pembuat regulasi dalam hal ini perpajakan dengan pembayar pajak dalam hal ini manajemen perusahaan [26].

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak [27] menjelaskan bahwa usaha dan perbuatan yang ditujukan secara langsung kepada fiskus bertujuan menghindari pajak merupakan perlawanan pajak aktif. Berbagai Metode dan teknik dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. [10] mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan pengurangan pajak dengan sikap hati-hati dan memanfaatkan celah dalam ketentuan pajak seperti pengenaan pajak melalui beberapa transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah akses perusahaan yang memiliki kemudahan didalam pemerintahan seperti risiko pemeriksaan pajak yang rendah [12]. Hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan atau kegiatan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena keduanya akan tetap saling mempengaruhi. Perusahaan yang terkoneksi politik ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau perusahaan memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah [22]. Perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau perusahaan memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah [22] [22] [13] [14]. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila minimal salah satu pimpinan perusahaan merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki hubungan dekat dengan politikus atau

partai politik [28]. Hubungan dekat yang dimaksud meliputi: (a) Pimpinan perusahaan yang memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen, partai politik, (b) Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri pada periode sebelumnya, (c) Perusahaan terlibat secara langsung dalam dunia politik. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah pinjaman dapat diperoleh dengan lebih mudah.

Komite Audit

Sejak direkomendasikan corporate governance di Bursa Efek Indonesia (BEI). Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen dibawah pengawasan dewan komisaris perusahaan yang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki kompetensi pada bidang akuntansi atau keuangan lebih memahami risiko deteksi dalam peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak. [19] menyatakan dalam suatu perusahaan jumlah komite audit sesuai dengan peraturan BEI yaitu mengharuskan minimal 3 (tiga) orang sehingga akan meningkatkan pengawasan tindakan yang dilakukan manajemen dalam melakukan meminimalisasi laba untuk pembayaran pajak.

[19] menyatakan dalam suatu perusahaan jumlah komite audit sesuai dengan peraturan BEI yaitu mengharuskan minimal 3 (tiga) orang sehingga akan meningkatkan pengawasan tindakan yang dilakukan manajemen dalam melakukan meminimalisasi laba untuk pembayaran pajak. Menurut [18] [29] menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka akan meningkatkan kualitas good corporate governance sehingga mampu

memperkecil kemungkinan terjadinya *tax avoidance*

Hipotesis

Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance*

Koneksi politik merupakan hubungan antara beberapa pihak yang saling menguntungkan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik [30]. Perusahaan yang berkoneksi politik adalah Perusahaan yang memiliki kedekatan dan menjalin ikatan secara politik dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik sering dimanfaatkan untuk memperoleh perlakuan istimewa atas kedekatan top management dengan politisi atau pemerintah dan memberikan akibat positif untuk suatu perusahaan terhadap *tax avoidance* [31]. Perusahaan yang terkoneksi politik juga menikmati pajak yang lebih rendah [16]. [32] menyebutkan perlakuan istimewa terhadap perusahaan yang mempunyai koneksi politik yaitu memperoleh kemudahan dalam pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif dalam menetapkan tax planning yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Selain itu, adanya preferensi dalam pengawasan dan lemahnya penegakan sanksi pajak membuat perusahaan yang mempunyai koneksi politik seperti tidak tersentuh (untouchable) sehingga terdapat kaitan positif antara koneksi politik dan *tax avoidance* [14].

[15] [17][14] [13] menyimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu diduga ada hubungan positif antara koneksi politik terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis satu yang dapat ditarik adalah:

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax*

avoidance

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen serta memastikan bahwa perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku [33]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [19] menemukan bahwa jumlah komite audit kurang dari tiga orang menunjukkan adanya tidak sesuaian terhadap peraturan bursa efek Indonesia sehingga tindakan manajemen dalam melakukan pengurangan laba untuk kepentingan pajak meningkat. Menurut [18] dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas good corporate governance yang semakin tinggi menunjukkan pentingnya keberadaan komite audit dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil tindakan *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh [20] yang menunjukkan bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* hal itu dapat diartikan semakin banyak jumlah komite audit sesuai dengan peraturan BEI maka dapat memperkecil tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

METODOLOGI

Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur dan sektro utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perusahaan manufaktur dan perusahaan

utama yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017.

Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama 2013-2017, jika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga kurang relevan dengan penelitian ini.

Perusahaan sampel menggunakan mata uang Rupiah.

Perusahaan memiliki data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan penelitian ini.

Tax avoidance

Tax avoidance merupakan tindakan yang bertujuan meminimalkan kewajiban pajak secara hati-hati dengan mengambil celah-celah dalam ketentuan pajak [10]. *Tax avoidance* pada penelitian ini diukur menggunakan rasio CETR dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah akses perusahaan untuk memperoleh kemudahan dalam pemerintahan dan perlakuan khusus dari pemerintah yang sedang berkuasa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah [28]. Koneksi politik dijelaskan menggunakan variabel dummy, dengan memberu nilai 1 (satu) untuk perusahaan yang terindikasi koneksi politik dan nilai 0 (nol) untuk sebaliknya. Kriteria perusahaan yang terkoneksi politik ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [34] yaitu:

Salah satu direktur atau komisaris merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik.

Salah satu direktur atau komisaris merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer,

Salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10%

merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

Komite Audit

Komite audit adalah komite tambahan yang dibawah oleh dewan komisaris dengan tugas utama membantu komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengontrol apakah perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menghindari kecurangan yang dilakukan manajemen [35]. Komite audit diukur menggunakan variabel dummy yang bernilai 1 jika komite audit berjumlah 3 (tiga) anggota dan nilai 0 (nol) jika komite audit kurang dari 3 (tiga) anggota [36]

Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai informasi relevan yang terkandung dalam data tersebut.

Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi, Uji asumsi klasik Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan data terdistribusi normal.

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan data terdistribusi normal. Jika asumsi klasik terdistribusi normal tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi maka akan menghasilkan estimator yang sesuai Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), yang artinya model regresi dapat digunakan sebagai alat estimasi penelitian [37].

Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan analisis grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05[38].

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika nilai tolerance lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas [38].

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diuji menggunakan uji Glejser yang digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dengan tidak adanya heteroskedastisitas di suatu model regresi, atau biasa disebut dengan homoskedastisitas. Dasar untuk menguji heteroskedastisitas adalah dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikannya $> 0,05$. Sebaliknya, jika nilai signifikannya $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas[38].

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul dari observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya [38].

2. Pengujian Hipotesis

Analisis Linier Berganda

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu.

Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji linear yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, pengaruh dapat dilihat dari hubungan positif atau negatif antara variabel dependen dengan variabel independen, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y =Tax avoidance

β =Koefisien Regresi

X_1)=Koneksi Politik

X_2)=Komite Audit

e =Standar eror

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien Determinasi adalah uji yang digunakan untuk pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen adalah koefisien determinasi (R^2). Penilaian koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Hasil nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Apabila dalam uji empiris terdapat Adjusted R^2 bernilai negatif, maka nilai Adjusted R^2 dianggap nilainya nol [38].

Uji F

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk mrngukur apakah variabel independen yang ada dalam model mempunyai pengaruh secara

simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian hipotesis dengan statistik F dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai $F > 4.00$ dan nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka hipotesis diterima [38].

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk melihat dan menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Dapat dilakukan uji t apabila nilai signifikansi t pada masing-masing variable yang ada pada output hasil regresi menggunakan SPSS memiliki tingkat significant level 0.05 ($\alpha= 5\%$). Diputuskan bahwa H_0 ditolak apabila signifikan $t \geq 0.05$, sedangkan ditingkat signifikan itu juga H_a diterima yang berarti secara individual variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel independen. Diputuskan H_0 diterima apabila signifikan $t \leq 0.05$, sedangkan H_a ditolak yang berarti secara individual variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen[38].

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi mendeskripsikan atau memberigambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari masing-masing variabel yaitu koneksi politik, komite audit dan *tax avoidance*

Tabel 2. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Koneksi Politik	250		1.00	.3600	.48096
Komite Audit	250	.00	1.00	.9920	.08926
<i>Tax avoidance</i>	250	.04	5.05	.4299	.50228
Valid N (listwise)	250				

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan variabel koneksi politik memiliki nilai minimum sebesar

0,00, nilai maksimum sebesar 1,00, nilai *mean* sebesar 0,360 artinya perusahaan manufaktur dan perusahaan utama rata-rata memiliki koneksi politik sebesar 36% dan nilai standar deviasi sebesar 0,48096 lebih besar dari rata-rata, hal ini menjelaskan koneksi politik memiliki varian sebaran data yang besar. Variabel komite audit memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,00, nilai *mean* sebesar 0,9920 artinya sebesar 99% perusahaan manufaktur dan perusahaan utama rata-rata menerapkan peraturan

BEI yang mengatur jumlah anggotakomite audit minimal 3 orang dan nilai standar deviasi sebesar 0,08926 lebih rendah dari rata-rata artinya sebaran data untuk variabel komite audit

rendah. Variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 0,04, nilai maksimum sebesar 5,05, nilai *mean* sebesar 0,4299 artinya sebanyak 42% perusahaan manufaktur dan perusahaan utama melakukan *tax avoidance* dan nilai standar deviasi sebesar 0,50228 hal ini menjelaskan variabel *tax avoidance* memiliki varian sebaran data yang besar.

Uji Normalitas

Uji normalitas ini menggunakan uji statistik Kolmogoro-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji statistik Kolmogoro-Smirnov adalah Asymp Sig (2- tailed) lebih dari 0,005. Hasil pengujian disajikan pada tabel 3. sebagai berikut

Tabel 3. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		250
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,67917332
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		1,148
Asymp. Sig. (2-tailed)		,143

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2- tailed)* sebesar 0,143. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga data residual terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* lebih dari 10% maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dijelaskan dalam tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Toleranc e	VIF
1 Koneksi Politik	,995	1,005
Komite Audit	,995	1,005

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dengan nilai VIF untuk variabel koneksi politik dan variabel komite audit sebesar 1,005 dan nilai *tolerance* untuk variabel koneksi politik dan komite audit sebesar 0,995.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pada penelitian ini, pembahasan akan dilakukan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar untuk menguji heteroskedastisitas adalah dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikannya $>0,05$. Sebaliknya, jika nilai signifikannya $<0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,536	,319		1,679	,094
Koneksi Politik	,140	,075	,118	1,867	,063
Komite Audit	-,094	,409	-,015	-,230	,818

a. Dependent Variable: Abs_Res1

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5. menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan nilai signifikan lebih dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin Watson dengan signifikansi 5% dengan jumlah sampel 250 dan jumlah independen 2, nilai $DU < DW$ dan nilai DW lebih kecil dari $(4-DU)$. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 6. sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durb in-Watson
1	,300 ^a	,090	,083	,68192	2,062

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Koneksi Politik

b. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: Data diolah tahun 2019

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinan (*Adjusted R Square*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Uji Koefisien Determinan Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,300 ^a	,090	,083	,68192

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11,359	2	5,680	12,214	,000 ^a
Residual	114,858	247	,465		
Total	126,217	249			

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Koneksi Politik

b. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: Data diolah tahun 2019

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Koneksi Politik

b. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Bedasarkan tabel 7. menunjukkan besar Adjusted R Square adalah 0.083. Artinya 8,3% variabel *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel koneksi politik dan komite audit sisanya 91,7%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang ada pada model secara bersama-sama terhadap variabel dependen. dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan hipotesis diterima.

Berdasarkan tabel 8. menunjukkan bahwa hasil uji F dengan nilai F sebesar 12,214 dengan probabilitas 0.000, dapat disimpulkan bahwa

koneksi politik dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Uji Statistik t

Uji t ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari uji t:

**Tabel 9. Uji Statistik t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,084	,482		2,247	,026
Koneksi Politik	,228	,113	,123	2,018	,045
Komite Audit	-2,870	,618	-,283	-4,645	,000

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 9. menunjukkan bahwa variabel Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada tingkat signifikan 5%. Koneksi politik memiliki probabilitas sebesar $0.045 < 0,05$ dengan nilai t sebesar 2.018. Komite audit memiliki probabilitas $0,00 < 0.05$ dengan nilai sebesar -4.645. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai signifikan yang dihasilkan koneksi politik sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan adalah positif sebesar 0,123. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, hal ini menandakan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif pada *tax avoidance* bahwa hubungan politik yang tinggi maka tingkat tindakan penghindaran pajak semakin tinggi pula. Ketika sebuah perusahaan terhubung secara politik perusahaan tersebut cenderung membayar pajak yang lebih rendah serta mendapat fasilitas pemeriksaan pajak yang rendah. [13] menyebutkan bahwa dalam dunia

usaha antara perusahaan dengan pemeritahaan saling membutuhkan dimana perusahaan membutuhkan pemerintah terkait izin usaha yang

akan dijalankan serta untuk melegitimasi kegiatannya di dalam pasar, sedangkan pemerintah membutuhkan perusahaan untuk menambah pendapatan negara dari pemungutan pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang di lakukan [15], [39], dan [14] menyimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance*

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikan komite audit sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan sebesar -2,83. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H_2 diterima, artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dan tambang.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah audit pada suatu perusahaan maka tindakan manajer untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

[11] dan [39] yang menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mensyaratkan anggota komite audit sekurang-kurangnya adalah tiga orang. Komite audit memiliki peran penting dalam pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk mencegah kecurangan oleh pihak manajemen.

Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Keahlian akuntansi dan keuangan yang dimiliki komite audit diharapkan dapat memberikan saran serta arahan yang berguna untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin banyak komite audit yang ada dalam suatu perusahaan, semakin rendah tingkat praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [14] dan [13] yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan [22],[39] dan [11] yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lainnya seperti *foreign activity*, *transfer pricing*, atau *real earnings management*.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran *tax avoidance* selain CETR misalnya menggunakan pengukuran *book tax gap (BTG)* atau *Book Tax Difference (BTD)*.

DAFTAR PUSTAKA

[1] T. Puji & Y. A. Aryani, Tren Penghindaran

Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di Bei Tahun 2001-2014. *XX(03)*, 375–388. 2016

- [2] S. D., Dyreng, M. Hanlon, , & E. L. Maydew,. *Long-Run Corporate Tax avoidance. Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61.2008>
- [3] Alfajri. Pengaruh Profitabilitas, Proposi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) pada Perusahaan Property yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1094–1107. 2016.
- [4] A. A. Purbaya. Kasus Pajak, Direktur di Semarang Dihukum 7 Bulan Penjara. Retrieved from <https://news.detik.com> website: <https://news.detik.com..2016>.
- [5] N. S. Hardika. Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 3(2), 102–112. 2007
- [6] I. Maharani & K. Suardana. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 525–539. 2014
- [7] R. H. Alfia. Pengaruh Corporate Governance, Karakter Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Upaya Penghindaran Pajak (*Studi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Listing di BEI Tahun 2012-2014*). (August), 1–43. 2014
- [8] D. K. Wardani & D. K. Santi. Pengaruh *Tax Planning*, Ukuran Perusahaan, Corporate *Social Responsibility (CSR)* Terhadap Manajemen Laba. 6(1), 11–24. 2018
- [9] T. N. Agustin. *Tax avoidance* : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-

- 2015).2017
- [10] F Jacob & O.Fca. *An Empirical Study of Tax Evasion and Tax avoidance : A Critical Issue in Nigeria Economic Development*. 5(18), 22–27. 2014
- [11] P.Diantari & I. Ulupui. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.2016
- [12] S.Butje & E.Tjondro. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance*. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s40543-014-0024-3.2014>
- [13] N.Utari, Y Kadek & N.L. Supadmi, N. L. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik pada *Tax avoidance*. *Journal of Pathology*, 179, A45–A45. 2017
- [14] Y.Ferdiawan & A.Firmansyah. Pengaruh *Political Connection, Foreign Activity*, dan *Real Earnings Management* Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3),93–116. <https://doi.org/http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>. 2017
- [15] E.PHardianti. Analisis Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Mempunyai Koneksi Politik. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 1–25.2014
- [16] M.Faccio . *Discussion of “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.” Contemporary Accounting Research*, 33(1), 115–120. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12214.2014>
- [17] F. R. Lugesti. Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Karakteristik Eksekutif, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (*Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015*) (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/50103/>. 2017
- [18], N. A Annisa& L. Kurniasih . Pengaruh Corporate Governance terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8, 123–136. 2012
- [19] H. T. Pohan . Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113.2009
- [20] F.Winata. Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.2014
- [21] I. M. S.Dharma & , P. A. Ardiana. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.2016
- [22] N. S., Fadhila, D.Pratomo & S.P.Yudowati. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21, 1803–1820. **Error! Hyperlink reference not valid..2017**
- [23] M. C. Jensen & W. H. Meckling. Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–206. 1976
- [24] M. C Jensen . *Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review*, 76(2), 323–329.1986

- [25] R. L Watts & J. L. Zimmerman . Accounting Year Theory: Ten Perspective. *American Accounting Association*, 65(1), 131–156.2012
- [26] A. P. N. Wicaksono . Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833.2017>
- [27] C. A. Pohan . *Manajemen perpajakan. Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2013
- [28] C. F. Kim & L.Zhang, L. *Corporate political connections and tax aggressiveness*. 33(1), 78–114.2016
- [29] N. N. K. Dewi & , I. K. Jati. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada *Tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.2014
- [30] S. M., Purwanti & L. Sugiyarti. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.2017
- [31] B. A. Pronto & A. K. Widagdo. Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, (2460–0784), 8–15.2016
- [32] R.Anggraeni. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Aggressiveness. 10(2), 1–15.2018
- [33] W. I. Fadila. Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) (*Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2016*). 7–19.2017
- [34] M.Faccio. *Politically Connected Firms*. *American Economic Review*, 96(1), 369–386.<https://doi.org/10.1257/000282806776157704.2007>
- [35] A.Eksandy. Pengaruh Komisaris Independen Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*). *Competitive*, 1, 1–20.2017
- [36] T.Kurniasih & M.M.R. Sari. Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax avoidance*. *BULETIN STUDI EKONOMI*, 18, 58–66. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/6160/4647.2013>
- [37] I. Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.2011
- [38] I. Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.; A. Tejkusmi, Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas.2018
- [39] A.F. Rachmithasari. Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)*.2015

- [1] management development,” *Int. J. Qual. Reliab. Manag.*, vol. 12, no. 7, pp. 28–35, 1995.
- [2] K. E. Voss, E. R. Spangenberg, and B. Grohmann, “Measuring the hedonic and utilitarian dimensions of consumer attitude,” *J. Mark. Res.*, vol. 40, no. 3, pp. 310–320, 2003.
- [3] C.-C. Yang, P.-S. Chen, and Y.-H. Chien, “CUSTOMER EXPERTISE, AFFECTIVE COMMITMENT, CUSTOMER PARTICIPATION, AND LOYALTY IN B & B SERVICES.,” *Int. J. Organ. Innov.*, vol. 6, no. 4, 2014.
- [4] M. G. Ragheb and R. L. Tate, “A behavioural model of leisure participation, based on leisure attitude, motivation and satisfaction,” *Leis. Stud.*, vol. 12, no. 1, pp. 61–70, 1993.
- [5] I. Ajzen, “From intentions to actions: A theory of planned behavior,” in *Action control*, Springer, 1985, pp. 11–39.
- [6] M. Iranmanesh, S. Moghavvemi, S. Zailani, and S. S. Hyun, “The role of trust and religious commitment in Islamic medical tourism,” *Asia Pacific J. Tour. Res.*, vol. 23, no. 3, pp. 245–259, 2018.
- [7] J. F. Hair Jr, G. T. M. Hult, C. Ringle, and M. Sarstedt, *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications, 2016.
- [8] W. W. Chin, “The partial least squares approach to structural equation modeling” dalam *Modern Methods for Business Research*, Ed. GA Marcoulides.” Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1998.
- [9] J. Henseler, C. M. Ringle, and R. R. Sinkovics, “The use of partial least squares path modeling in international marketing,” in *New challenges to international marketing*, Emerald Group Publishing Limited, 2009, pp. 277–319.
- [10] H. M. Jogiyanto and W. Abdillah, “Konsep dan aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris,” *BPFE Fak. Ekon. dan Bisnis UGM. Yogyakarta*, 2009.
- [11] I. Bazazo, T. Elyas, L. Awawdeh, and M. Faroun, “The impact of Islamic attributes of destination on destination loyalty via the mediating effect of tourist satisfaction,” *Int. J. Bus. Adm.*, vol. 8, no. 4, pp. 65–78, 2017.
- [12] B.-L. Cheng, “Service quality and the mediating effect of corporate image on the relationship between customer satisfaction and customer loyalty in the Malaysian hotel industry,” *Gadjah Mada Int. J. Bus.*, vol. 15, no. 2, pp. 99–112, 2013.
- [13] S. Coban, “The effects of the image of destination on tourist satisfaction and loyalty: The case of Cappadocia,” *Eur. J. Soc. Sci.*, vol. 29, no. 2, pp. 222–232, 2012.

